

INTISARI

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya mendayagunakan masyarakat yang berorientasi untuk membangun masyarakat yang mandiri sehingga pembangunan masyarakat bercirikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Berdasarkan hasil pra-survei menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang Kaki Lima merupakan suatu kegiatan ekonomi dalam wujud sektor informal yang membuka usahanya di bidang produksi dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan modal yang relatif kecil serta menempati ruang publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Dipenogoro Kabupaten Sumenep. Metode penelitian dekriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Areal Kota Sumenep berdasarkan masalah dan potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa langkah yang dilakukan pemerintah dalam proses pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan dengan beberapa tahap yaitu melakukan relokasi; pemberian tenda ataupun gerobak; kemudian melakukan penertiban sebagai langkah terakhir bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih membandel tidak mau mengikuti program penataan yang dilakukan Pemerintah. Dampak yang terjadi akibat dari kegiatan pemberdayaan diantaranya yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan tenang tanpa adanya ancaman penertiban. Sedangkan dampak bagi Pemerintah adalah dengan keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) banyak menunjang peningkatan pendapatan daerah dengan pemungutan pajak retribusi. Akan tetapi dampak negatifnya yaitu sulitnya Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk direlokasi mengingat rendahnya pemahaman yang mereka miliki tentang relokasi.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Pedagang Kaki Lima (PKL), Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

Community empowerment is an effort to utilize society that is oriented towards building an independent society so that community development is characterized by, by and for the community. Based on the pre-survey results, it shows that the majority of street vendors are an economic activity in the form of the informal sector who open their businesses in the field of production and sale of goods and services using relatively little capital and occupying public spaces. The aim of this research is to determine the empowerment carried out by the Sumenep Regency Government towards Street Vendors (PKL) on Jalan Dipenogoro, Sumenep Regency. Qualitative descriptive research method to answer the problem of how empowerment is carried out by the Sumenep Regency Government towards Street Vendors (PKL) in the Sumenep City Area based on the problem and its potential in improving the welfare of the community.

Based on the research results, it is known that the steps taken by the government in the process of empowering Street Vendors (PKL) were carried out in several stages, namely relocating; provision of tents or carts; then carry out control as the final step for Street Vendors (PKL) who are still stubborn and do not want to follow the structuring program carried out by the Government. The impacts that occur as a result of empowerment activities include that street vendors (PKL) can carry out their business activities calmly without any threat of control. Meanwhile, the impact for the Government is that the presence of Street Vendors (PKL) has greatly supported increasing regional income by collecting tax levies. However, the negative impact is that it is difficult for Street Vendors (PKL) to relocate considering the low understanding they have about relocation.

Keyword : Community Empowerment, Street Vendors (PKL), Community Welfare.